

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal pada unsur Lingkungan Pengendalian belum dapat dikatakan efektif karena ada beberapa faktor yang menghambat, terdiri dari :
 - a) Komitmen Terhadap Kompetensi dimana kualifikasi pegawai pada bidang Pendataan dan Penilaian belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan bidang perpajakan.
 - b) Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan dimana masih terdapat rangkap tugas pegawai karena minimnya pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dalam menginput data PBB-P2.
 - c) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab dimana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum berdasarkan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pegawai.
 - d) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia dimana rekrutmen pegawai tidak berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang dan tidak ada pelatihan khusus bagi pegawai.

2. Penilaian Risiko pada Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Malaka belum efektif karena kurangnya kegiatan Identifikasi Risiko dan Analisa Risiko terkait Penerimaan PBB-P2.
3. Kegiatan Pengendalian pada Penerimaan PBB-P2 dapat dikatakan efektif karena BPKPD Kabupaten Malaka telah menjalankan beberapa kegiatan pengendalian seperti melakukan pendataan objek pajak, mengirimkan SPPT kepada wajib pajak tepat waktu, menggunakan sistem penagihan rutin, memantau pembayaran dan menyusun pelaporan berkala.
4. Informasi dan Komunikasi pada Penerimaan PBB-P2 dapat dikatakan efektif karena BPKPD Kabupaten Malaka menyediakan website resmi terkait PBB-P2 yang dapat diakses oleh wajib pajak, bekerja sama dengan bank NTT untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak dan bekerja sama dengan para kepala desa beserta aparat desa (dusun) untuk menyebarkan informasi, blanko PBB-P2 dan melakukan penagihan tepat waktu.
5. Pemantauan pada Penerimaan PBB-P2 belum efektif meskipun BPKPD sering melaksanakan pemantauan data objek pajak secara rutin namun belum efektif dalam melakukan survei lapangan, Pemantauan Proses Penetapan dan Penagihan juga belum dijalankan secara efektif atau maksimal oleh pihak intern BPKPD dalam memastikan penagihan, Audit dan Inspeksi telah dijalankan secara efektif dan maksimal oleh pihak BPKPD dan dilakukan secara rutin

dan Evaluasi Terpisah belum efektif karena belum dijalankan dengan baik oleh BPKPD.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka perlu meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti melaksanakan perekrutan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan yang relevan dan mengadakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada pegawai sesuai bidangnya.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti peningkatan kompetensi pegawai khususnya pada bidang Pendataan dan Penilaian (PBB-P2) melalui pelatihan khusus bagi pegawai di bidang Pendataan dan Penilaian (PBB-P2), mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi kinerja untuk menilai risiko dan menganalisis risiko terkait penerimaan PBB-P2, meninjau kembali struktur organisasi untuk mengurangi rangkap tugas dan menambah atau merekrut pegawai yang sesuai dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan, meningkatkan pemantauan pembayaran PBB-P2 untuk mengurangi tunggakan serta mengadakan survei lapangan secara rutin untuk memastikan kesesuaian data objek pajak dan wajib pajak untuk menghindari kesalahan data objek pajak.